

PERAN POLITIK DALAM KOMUNIKASI GERAKAN SOSIAL KOMUNITAS PERUBAHAN IKLIM

Robby Firliandoko¹, Sarwititi Sarwoprasodjo², Amiruddin Saleh³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor,

²³Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

Article Info

Article history:

Received May 12th, 2023

Accepted Nov 20th, 2023

Published Dec 1st, 2023

Keyword:

Community; Climate Change; Political; Social Movement

Abstract

The Climate Smart Generation Community (GCI) is an example of a group of agents of change in the field of climate change who carry out social movement activities in the community to invite them to adapt, mitigate and save the environment. The Climate Smart Generation Community be an object of this research because it is a community that operates in the field of climate change through preventive and curative education for children to increase understanding of disaster mitigation and build the character of loving the environment from an early age. In social movements, politics is one of the supporting factors for inhibitors. This research using qualitative methods and constant comparative data analysis. Distance research data collection techniques support data collection through semi-structured interviews. The data collected is in the form of answers submitted by informants. The collected research data is then grouped, categorized, and themed into key terms, terms of equal value. These key terms are then connected, analyzed, and combined with existing research results as a form of support or refutation. This research found that political constellations at the regional to national levels did not significantly influence the movements carried out by GCI. In contrast to these conditions, local-level political stakeholders such as the RT to the Village Government provide support from permits to facilities in activities. Gatherings and proposals are the medium of communication used to gain local government support. Messages are one of the weapons for GCI to seek and gain support from political entities. The message regarding requests for sources and delivery of work programs to political entities, especially the government, was succeeded. Not only getting support from seeds from the government, but GCI also gets support for access to other agencies and funding support through the competition process. Winning the race also resulted in trust from political entities.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim menyebabkan bencana, merenggut nyawa, dan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Tidak hanya perlu menyeimbangkan alam, manusia juga harus sadar dan tanggap

terhadap bencana untuk meminimalisir korban dan kerugian yang signifikan. Salah satu upaya penanggulangan bencana atau yang biasa disebut mitigasi bencana perlu dikomunikasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat tanggap terhadap bencana

Corresponding Author:

Robby Firliandoko, Sains Komunikasi Universitas Djuanda

Email: robby.firliandoko@unida.ac.id

dan menjaga keseimbangan alam. Komunikasi dapat berperan dalam pelaksanaan mitigasi bencana.

Diperlukan perencanaan strategi komunikasi yang matang dan implementasi yang tepat untuk mengatasi ketidaksiapan masyarakat menghadapi bencana akibat perubahan iklim atau bencana alam yang dapat memakan banyak korban dan kerugian. Perubahan perilaku dalam menjaga keseimbangan alam dan menjaga lingkungan diharapkan dapat dilakukan oleh masyarakat. Mereka bisa menjadi kebiasaan saling mendukung di mana kegiatan masyarakat dapat terus berlanjut. Masyarakat juga nyaman dan tentram karena aman dan jauh dari dampak bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu atau sudah memiliki perilaku siap menghadapi bencana yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Komunikasi masyarakat dapat mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, terutama dalam menjaga lingkungan (Lasinta *et al.*, 2019).

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Komunitas Perubahan Iklim sebagai salah satu bentuk gerakan sosial untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku ramah lingkungan dan menjaga keindahan alam di masyarakat. Masyarakat dapat menjadi salah satu aktor dalam mengembangkan gerakan komunikasi sosial untuk mengatasi permasalahan lingkungan

dan perubahan iklim. Generasi Cerdas Iklim (GCI) adalah komunitas yang bergerak di bidang perubahan iklim melalui pendidikan preventif, kuratif bagi anak-anak untuk meningkatkan pemahaman mitigasi bencana dan membangun karakter cinta lingkungan sejak dini. Unsur utama dalam pelaksanaan program GCI adalah perpaduan antara kearifan lokal dan konsep Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Komunitas GCI juga merupakan komunitas berprestasi yang sudah mendapatkan prestasi di tingkat daerah, nasional hingga internasional (Zul, 2017; Danty & Zul, 2019).

Komunitas dapat menjadi salah satu upaya menularkan gerakan yang baik di masyarakat apalagi untuk menyelesaikan isu-isu yang dapat menjadi atau memiliki risiko, dalam penelitian kualitatif yang dilakukan di sebuah komunitas di Tiongkok, Nigeria dan Indonesia, Dewantara & Widhyharto, 2016; Hapsari, 2016; Hasna, 2022; Olson, 2016; J. Y. Zhang, 2018, menemukan bahwa upaya kolektif masyarakat yang sederhana namun memiliki pengaruh meskipun dilakukan secara nyata maupun maya terhadap politik.

Melalui gerakan-gerakannya, sekumpulan anak muda yang tergabung di Komunitas GCI ini mencoba memberikan langkah nyata dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Gerakan sosial tidak bisa lepas dari peluang politik yang biasanya

menjadi latar belakang gerakan sebagai peluang maupun ancaman dalam setiap gerakan. Penelitian ini ingin menganalisa peran politik dalam komunikasi gerakan sosial komunitas perubahan iklim.

Kondisi politik menjadi salah satu faktor gerakan sosial yang dilakukan oleh komunitas, Zhang dan Mao (2013) menemukan bahwa gerakan komunitas mampu menjadi ruang baru di dalam masyarakat akar rumput untuk saling menghargai dan membangun kolaborasi meskipun kondisi politik di Tiongkok masih membatasi adanya gerakan seperti itu di masyarakat akar rumput.

Manulu (2016) mengungkapkan bahwa gerakan perlawanan masyarakat Batak dengan Perusahaan Bubur Kayu dan Kertas atas dasar kebijakan publik dapat mengubah kebijakan itu sendiri di Sumatera Utara.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, politik menjadi salah satu faktor pendukung maupun penghalang dalam gerakan sosial yang dilakukan di berbagai komunitas. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran politik dalam komunikasi gerakan sosial komunitas perubahan iklim, khususnya Komunitas Generasi Cerdas Iklim.

Penelitian Sinaga (2020) mengungkapkan bahwa Indonesia belum mencapai hasil yang signifikan dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam

mitigasi perubahan iklim, pemerintah era 2004-2014 melakukan pendekatan regulasi, terutama berkaitan dengan kebijakan energi Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 serta deforestasi dan lahan menggunakan perubahan Inpres No. 10 Tahun 2011, namun mengalami inkonsistensi dalam penerapan. Alih-alih menjadi lebih baik, laju deforestasi dan emisi berbasis batu bara bahkan semakin tinggi karena tingkat konsumsinya berlipat ganda dari tahun 2000 hingga 2010.

Penyelesaian masalah lingkungan dan perubahan iklim memang tidak hanya menjadi peran pemerintah. Masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung memiliki banyak respon dan salah satunya dengan membangun komunitas. Komunitas kaum muda yang mengangkat isu-isu lingkungan lazim disebut Organisasi Pemuda Lingkungan (OPL) menjamur dan digandrungi kaum muda di beberapa kota di Indonesia (Suharko *et al.*, 2002).

Nugroho (2015) mencatat bahwa organisasi lingkungan yang berbasiskan kaum muda pertama kali di Indonesia bisa dikatakan menjadi milik Klub Indonesia Hijau (KIH). Berdiri masing-masing di sejumlah kota seperti Surabaya pada tahun 1983, Jakarta pada tahun 1984, dan di Medan pada tahun 1990. KIH berdiri sebagai kepanjangan tangan dari Yayasan Indonesia Hijau (YIH) untuk bisa menjangkau

pendidikan lingkungan bagi kaum muda. Seiring tahun 2000-an, OPL mulai berkembang dan menjadi tren di kalangan kaum muda Indonesia. Kepedulian akan lingkungan hidup menjadi perhatian besar bagi berbagai kalangan kaum muda.

Peluang hadirnya OPL pada tahun 1983 juga didorong oleh keadaan politik pada masa itu, tepatnya pada tanggal 11 Maret 1982, saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (UULH Th. 1982) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup. Hal tersebut membuka lembaran baru bagi kebijaksanaan lingkungan hidup di Indonesia menuju pembangunan hukum lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip hukum lingkungan modern yang diakui secara internasional (Sutrisno, 2011).

Komunitas menjadi salah satu jalan yang dipilih GCI dalam menjalankan visi mereka dalam mengajak masyarakat untuk mengenal iklim, perubahan serta dampaknya dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Komunitas dipilih karena dinilai lebih mudah dalam menggapai mimpi atau menyelesaikan masalah karena dilakukan secara berkelompok. Hal ini didukung oleh Akbari (2020) yang menjelaskan bahwa pascaera reformasi atau setelah tragedi 1998 memungkinkan setiap pemuda berkontribusi

melalui kelebihannya masing-masing. Komunitas menjadi salah satu pilihan dalam proses pencarian jati diri pemuda hingga akhirnya dapat menjadi pemimpin yang siap menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Fenomena kepemimpinan muda yang lahir melalui komunitas membuktikan bahwa pemuda tidak ingin bergabung dalam organisasi politik atau lembaga formal sejenisnya tetapi tetap bisa ikut berkontribusi atau membuat perubahan untuk bangsa dan negara.

Kehadiran komunitas GCI yang melakukan gerakan sosial dalam penyelesaian masalah yang sedang menjadi fenomena dan kekhawatiran masyarakat global ini menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk diteliti. Meskipun demikian politik juga memiliki peran dalam gerakan sosial, untuk itu, penelitian ini memelajari tentang peran politik dalam gerakan sosial yang dilakukan oleh Komunitas GCI dalam melakukan praktik-praktik baik di bidang perubahan iklim. Penelitian ini diupayakan dapat memiliki manfaat bagi pegiat komunitas dan pemuda atau mahasiswa yang merupakan agen perubahan di tengah masyarakat, sehingga dapat memelajari praktik komunikasi komunitas dalam melakukan gerakan sosial baik dalam hal perubahan iklim maupun bidang lainnya sehingga terinspirasi dan lebih banyak lagi anak muda atau mahasiswa yang menjadi

agen perubahan, baik di bidang perubahan iklim maupun bidang lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Komunitas Generasi Cerdas Iklim (GCI) merupakan aktor komunikasi dalam perubahan iklim. Komunitas GCI telah melakukan komunikasi dengan kelompok rentan terhadap perubahan iklim yaitu anak usia sekolah dasar pada tahun 2015 hingga 2020 (sebelum pandemi).

Sumber data pada penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap satu orang informan kunci dan lima orang informan yang direkomendasikan oleh informan kunci. IKR (28) pendiri GCI sebagai key informan, SGT (30) Ketua GCI, FJR (30) Ketua Dewan Pengawas GCI, ARL (23) Direktur Pengabdian kepada Masyarakat GCI, RDH (24) Direktur Lembaga Beasiswa Bakti GCI dan SYR (23) GCI Sekretaris II.

Wawancara dilakukan secara daring pada tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan 9 Februari 2022 dengan menggunakan alat aplikasi Zoom. Teknik ini digunakan karena kondisi pandemi yang membuat seluruh pertemuan harus dibatasi. Informan yang diwawancarai juga didominasi oleh mahasiswa yang kembali ke daerahnya masing-masing karena pandemi.

Meskipun wawancara dilakukan secara online, terkumpul seluruh data yang diinginkan dengan mengajukan 15 pertanyaan. Rata-rata durasi wawancara yang dilakukan adalah antara 20 menit hingga 30 menit.

Hasil wawancara ditranskrip mulai tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan 12 Februari 2022. Uji kredibilitas data, menggunakan triangulasi. Triangulasi sumber digunakan karena penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dari berbagai sumber dalam komunitas GCI. Selanjutnya untuk membandingkan jawaban dan memvalidasinya, data berupa data tertulis dimasukkan ke dalam tabel yang telah disiapkan. Data diinput secara horizontal untuk membandingkan jawaban masing-masing informan. Tabel yang disusun secara horizontal menggabungkan pertanyaan-pertanyaan dengan seluruh jawaban informan sehingga dapat terlihat setiap jawaban dari masing-masing informan secara vertikal.

Pengumpulan data yang ada kemudian diolah dengan teknik komparasi konstan menggunakan Microsoft Excel mulai tanggal 14 Februari hingga 25 Maret 2022.

Data yang dikumpulkan berupa jawaban yang disampaikan oleh informan. Data penelitian yang terkumpul kemudian dikelompokkan, dikategorikan, dan diberi

tema ke dalam istilah-istilah kunci, istilah-istilah yang bernilai setara.

Seluruh jawaban yang lolos dan dinyatakan valid selanjutnya diinput ke dalam Microsoft Excel yang disusun secara vertikal. Jawaban dari masing-masing informan kemudian dipecah untuk mencari satuan makna dari setiap jawaban. Hal ini dilakukan untuk dapat menganalisis setiap satuan makna yang terdiri dari penggalan kalimat dan kata dari setiap jawaban sehingga menghasilkan 308 data yang merupakan satuan makna dari setiap jawaban informan.

Ke-308 data tersebut kemudian diringkas melalui proses seleksi dan pemfokusan setiap data berdasarkan deskripsi, kosa kata (*in vivo*), emosi, kata kerja (proses), nilai dan tema. Proses ini dilakukan untuk memfokuskan setiap jawaban sehingga terkumpul data untuk menentukan data yang saling berhubungan dan mendukung. Setelah disaring, dilakukan pengelompokan kembali data melalui proses analisis, perincian, konsep, dan penyusunan data berdasarkan kode-kode besar. Tema-tema yang terkandung dalam kode besar tersebut didasarkan pada *grand theory*, rumusan masalah dan temuan di lapangan. Kemudian, data-data tersebut disajikan dan dianalisis di dalam pembahasan dengan disandingkan dengan hasil penelitian serta teori yang sebelumnya sudah ada untuk

mendukung atau menyanggah hasil penelitian.

Kajian Konseptual

McAdam (2017) menjelaskan bahwa gerakan dapat difasilitasi oleh beberapa faktor salah satunya adalah peluang politik atau kendala politik yang dihadapi dari mulai keadaan politik yang menggerakkan atau peluang keadaan politik yang membuat gerakan bisa dilakukan untuk membangun aksi kolektif.

Masalah perubahan iklim menjadi salah satu kajian yang bisa diselesaikan melalui gerakan sosial. Gerakan sosial dianggap dapat menggerakkan individu hingga organisasi untuk membangun persepsi yang sama dan keluar dari masalah. McAdam (2017) yang menjelaskan bahwa untuk bisa mendorong masyarakat agar peduli terhadap isu peristiwa perubahan iklim adalah dengan menyusutkan cakrawala waktu untuk mengubah pemahaman yang salah tentang pemanasan global. McAdam juga menjelaskan bahwa aktivis perubahan iklim harus lebih baik dalam mendidik publik dengan cara mengirimkan kelompok kecil aktivis yang berdedikasi ke masyarakat rentan untuk mengingatkan kesadaran akan hubungan antara perubahan iklim dan cuaca ekstrem dan untuk mendorong tindakan di tingkat lokal untuk melawan ancaman tersebut.

Melalui berbagai perspektif, Manulu (2016) berhasil menghimpun dan menyimpulkan mengenai peluang politik. Dalam penelitiannya, Manulu menjelaskan bahwa perhatian sistematis pada struktur peluang politik yang memengaruhi kelangsungan gerakan sosial. Struktur peluang politik mencakup tingkat keterbukaan, tingkat stabilitas susunan elite yang berkuasa, adanya pengelompokan dan perpecahan elite, dan kapasitas negara serta kecenderungannya untuk menindas.

Zhang dan Mao (2013) menemukan bahwa gerakan komunitas mampu menjadi ruang baru di dalam masyarakat akar rumput untuk saling menghargai dan membangun kolaborasi meskipun kondisi politik di Tiongkok masih membatasi adanya gerakan seperti itu di masyarakat akar rumput. Hal ini juga menumbuhkan rasa kesukarelawanan, saling berbagi dan kolaborasi, meskipun seperti diketahui bahwa gerakan komunitas seperti ini masih dilarang untuk diperluas ke dalam gerakan politik.

Nofrima dan Qodir (2021) yang telah melakukan penelitian mengenai gerakan sosial Gejayan Memanggil menyatakan bahwa sumberdaya organisasi sosial meliputi jaringan sosial yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi dan mengembangkan

gerakan. Melalui jaringan mobilisasi massa itulah aktor-aktor gerakan sosial membingkai aksi dengan mengadakan konsolidasi massa dan memengaruhi kebijakan politik.

Peluang Politik atau kendala politik menjadi salah satu faktor komunitas mau menjadi *agent of change* di bidang perubahan iklim. Faisal (2017) seorang peneliti anak muda di dalam buku Generasi Phi menjelaskan bahwa meskipun pengaruh individualisme atau globalisasi terhadap generasi phi di Indonesia, (dalam konteks kewirausahaan) itu tidak akan membuat mereka individualis atau mementingkan kekayaan. Generasi Phi Indonesia akan bergerak berkontribusi pada lingkungan, membangun komunitas, menyelesaikan berbagai masalah sosial.

Kelompok juga memiliki penjelasan yang beragam, oleh karena itu disajikan jenis kelompok yang sekiranya sesuai dengan jenis komunitas yang akan diteliti yakni kelompok relawan atau kelompok *volunteer*. Soekanto (2015) menjelaskan bahwa dengan berkembangnya komunikasi serta masyarakat, ada beberapa kepentingan yang tidak terpenuhi, sehingga mendorong sekumpulan individu untuk membentuk kelompok volunteer. Kelompok volunteer mencakup orang-orang yang memunyai kepentingan sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat luas

daya jangkauannya tadi. Dengan demikian, maka kelompok-kelompok *volunteer* akan dapat memenuhi kepentingan-kepentingan anggotanya secara individual, tanpa mengganggu masyarakat secara umum. Kepentingan tersebut ada dua, ada kepentingan primer yang merupakan kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup wajar dari mulai kebutuhan sandang pangan papan hingga kebutuhan akan kasih sayang dan kepentingan sekunder seperti rekreasi.

Morissan (2015) juga menjelaskan bahwa kelompok sering kali dipandang sebagai sistem sibernatika di mana informasi dan pengaruh masuk ke dalam kelompok (disebut dengan masukan atau input), kemudian diolah menjadi proses dan mengeluarkan hasil, gagasan ini dikenal menjadi model masukan-proses-hasil.

TEMUAN DAN DISKUSI

Temuan dan diskusi yang ada di dalam pembahasan ini mengacu kepada kondisi politik yang menjadi salah satu dari tiga komponen gerakan sosial yang dijelaskan oleh McAdam (2017), dalam konsepnya McAdam menjelaskan bahwa gerakan dapat difasilitasi oleh beberapa faktor salah satunya adalah peluang politik atau kendala politik yang dihadapi dari mulai keadaan politik yang menggerakkan atau peluang keadaan politik yang membuat gerakan bisa dilakukan untuk membangun aksi kolektif.

Peran politik ini juga dipadukan dengan teori komunikasi yang pernah disampaikan oleh Harold Laswell *dalam* Susanti dan Nurtania (2017), bahwa ada lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu Pertama sumber yang melakukan komunikasi, Kedua pesan merupakan seperangkat simbol verbal maupun nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, Ketiga media, yaitu alat yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesan, Keempat penerima yaitu orang yang menerima pesan dari sumber, dan Kelima efek yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan.

Latar Belakang Gerakan Sosial dan Kondisi Politik

Pendidikan dan melakukan pendampingan untuk mengurangi dampak atas bencana yang disebabkan oleh iklim sejatinya merupakan tugas utama pemerintah yang memiliki peran untuk mencerdaskan dan menjamin perlindungan seluruh masyarakat Indonesia, namun GCI merasakan bahwa saat GCI lahir pemerintah masih belum memiliki program untuk memberikan pemahaman dan pendidikan ke masyarakat agar dapat beradaptasi dan melakukan mitigasi bencana. Pemerintah masih berfokus dalam kegiatan tanggap bencana. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga dianggap masih minim kekuatan untuk mengimplementasikan

program dalam menghadapi perubahan iklim di level daerah, nasional hingga internasional. Keadaan ini juga menjadi salah satu pendukung dalam proses penciptaan gagasan atau *ideation* dalam proses komunikasi.

"Sepulang dari Belanda diamanahi masuk ke Konsultan Internasional dan beberapa proyek yang fokus ke perubahan iklim bermitra dengan KLHK, sayangnya adalah mereka adalah new comers di Pemerintah. Masih belum punya power. Kegiatan masih minim, komitmen di internasional juga masih minim. Di berbagai kementerian juga ada sub direktorat tentang perubahan iklim tetapi tidak saling berkoordinasi. Lalu 2020 kemarin dibuat roadmap di KLHK dalam memberikan komitmen sampai ke Perubahan Iklim di level daerah. Ini juga bisa jadi pegangan untuk organisasi di level daerah," kata IKR, 28 tahun.

Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia belum menyentuh konsep strategis dimana perjalanan setengah abad keterlibatan Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim melalui upaya penurunan emisi GRK masih belum dilakukan dalam proses dua arah. Meski pemerintah telah melakukan komunikasi risiko melalui program pembangunan seperti Rencana Aksi Nasional (RAN) GRK, Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK, Pembangunan Industri Hijau, *Green Growth Economy*, hingga yang terakhir *Low Carbon Development Initiatives*, namun pesan risiko

untuk potensi bahaya dan ancaman lingkungan hidup di masa datang, dengan kata kunci utama penurunan emisi GRK, belum menyentuh pemahaman dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat. Mitigasi bencana perlu masuk dalam kebijakan daerah dari mulai perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan dilakukan untuk menentukan arah kebijakan penanggulangan bersifat pra bencana pada pembangunan daerah (Faturahman 2018; Patrianti *et al.* 2020).

Generasi Cerdas Iklim juga merasakan bahwa menyelesaikan permasalahan perubahan iklim tidak bisa sendiri, pemerintah saja yang merupakan sektor utama yang memiliki tanggung jawab utama masih dirasakan kurang dalam berperan. Komunitas GCI menempatkan posisi dengan pemerintah sebagai bentuk kolaborasi.

Kolaborasi multi pihak sangat didukung oleh persepsi serta partisipasi para pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan untuk meningkatkan persepsi serta partisipasi tersebut sangat didukung oleh peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat serta *stakeholder* lainnya. Kolaborasi multipihak dapat melibatkan partisipasi masyarakat dapat berperan penting ketika implementasi program yang bersifat sentralistik tidak berjalan efektif, salah satunya adalah untuk mengatasi terjadinya kesenjangan pemanfaatan

program, yang dalam ini adalah Program Kampung Iklim yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan efektivitas ketahanan adaptasi dan mitigasi risiko perubahan iklim di masyarakat (Ramdani & Resnawati 2022).

Peran Politik dalam Gerakan Sosial Komunitas Generasi Cerdas Iklim

Generasi Cerdas Iklim menyatakan bahwa konstelasi politik praktis yang elite di tingkat daerah hingga nasional tidak memengaruhi gerakan sosial yang dilakukan oleh GCI kepada masyarakat. Konstelasi politik praktis yang elite di tingkat daerah hingga nasional tersebut terkait pemilihan kepala daerah, presiden, pemilihan calon legislatif hingga partai politik yang merupakan kelompok politik praktis. Sederhananya, gerakan sosial Komunitas GCI tidak dipengaruhi oleh kondisi politik tersebut. Komunitas Generasi Perubahan Iklim (GCI) menyatakan bahwa sejak awal bergerak tidak pernah mendapatkan dukungan atau hambatan dari kelompok politik praktis dan menyatakan bahwa gerakan yang dilakukan adalah swadaya. Kemandirian dipilih oleh Pegiat Komunitas GCI karena ingin mandiri dan tidak terganggu oleh aktivitas dan aktor politik praktis. Selain itu, Komunitas GCI juga merasa bahwa kondisi politik tidak memberikan pengaruh kepada kegiatan yang dilakukan oleh GCI yang memiliki agenda

sendiri (*private agenda*) seperti tersirat dalam kutipan di bawah ini.

"Sejak dulu saya termasuk yang vokal ketika GCI berdiri dan sejak awal kita harus independen even kita ga punya modal atau uang untuk jalanin kegiatan dan berarti itu kita harus cari. Ga boleh terafiliasi dengan politik dan industri yang menciptakan citra," kata SGT, 30 tahun.

"Dorongan politik tidak ada, semua swadaya dari alumni dan lomba-lomba," kata ARL, 23 tahun.

"Dorongan Politik gak ada sama sekali. Kita pure komunitas mandiri," kata RDH, 24 tahun, perempuan.

"Ga ada sii. Ini semua Nonpolitis semua," kata SYR, 23 tahun.

Prinsip kemandirian GCI atas kelompok politik praktis merupakan sebuah upaya yang didukung oleh Singh dalam Hidayat (2017) yang menjelaskan bahwa krisis atau situasi konfliktual mendorong lahirnya sebuah gerakan lingkungan. Keadaan yang konfliktual inilah yang kemudian memunculkan aksi kolektif yang secara mandiri dalam usahanya menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam melakukan aktivitas gerakan sosialnya, GCI tidak bekerja sama dan menyatakan tidak mendapat pengaruh dari aktivitas politik praktis secara luas, namun GCI mendapat dukungan dari institusi-institusi yang memiliki kekuatan politik seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai Golongan Intelektual yang memberikan bantuan dana dan publisitas di media sejak 2015 hingga 2016 dan Gubernur

Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil sebagai birokrasi yang memberikan Penghargaan Organisasi Kepemudaan Kategori Lingkungan Hidup (POK) pada tahun 2019, penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut juga membantu GCI mendapatkan bantuan dan kepercayaan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Kedutaan Besar (Kedubes) Belanda.

"IPB berperan penuh, mereka mendukung dari awal dari mulai funding, 2015-2016 dibantu IPB Full. Publisitas media juga dibantu oleh IPB dan bermanfaat sangat baik. 2019 dapat penghargaan dari Provinsi Jawa Barat dan karena itu dapat bantuan dari pihak lain seperti KLHK yang menjadikan GCI menjadi salah satu organisasi yang dilibatkan setiap kegiatan. Lalu dapat bantuan dari Kedutaan Besar Belanda seperti webinar sampai menanam pohon, dapat funding juga," kata IKR, 28 tahun.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa perhatian, bantuan dan penghargaan yang diberikan oleh IPB, Gubernur Jawa Barat, dan Kedubes Belanda menjadi sebuah dukungan yang membantu GCI, menurut Littlejohn dalam Tambunan (2021) dukungan sosial yang dirasakan mengacu pada keyakinan perhatian, penghargaan dan bagian dari jaringan dukungan sosial yang saling membantu.

Dukungan pemerintah dalam sisi kebijakan dan program untuk mengatasi perubahan iklim dirasakan GCI masih minim, namun saat ini Pemerintah sudah

mulai fokus mengatasi permasalahan perubahan iklim. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi politik eksternal yang turut memengaruhi kondisi politik di Indonesia. Pengaruh eksternal tersebut merupakan keputusan dari Konferensi Tingkat Tinggi tentang Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia pada Minggu (14/11/2021) lalu yang sempat dihadiri pemimpin dari 20 ekonomi terbesar dunia (G-20) termasuk Presiden Joko Widodo telah menyepakati keseriusan negara-negara dunia menghadapi tantangan perubahan iklim.

"G20 di Glasgow juga sangat berpengaruh. G20 juga menyepakati perubahan iklim jadi isu utama," kata IKR, 28 tahun.

COP-26 menjadi penting (seperti yang dikemukakan di atas) karena negara-negara membuat perjanjian tegas untuk secara radikal meningkatkan investasi melalui solusi berbasis alam (NbS) di kota, dan berkomitmen untuk memulihkan, melestarikan, dan berinvestasi dalam aset infrastruktur hijau dan biru yang secara inklusif mengatasi ketidaksetaraan yang mencolok antara penduduk miskin, minoritas, dan penduduk asli yang menghadapi beban terbesar dari dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan iklim. Banyak negara telah berjanji untuk menjadi nol bersih pada tahun 2050. Para ahli setuju bahwa ini dapat dicapai, tetapi akan membutuhkan pemerintah, bisnis dan

individu untuk membuat perubahan besar. Keputusan ini juga sangat berpengaruh untuk India karena dinilai memperkuat kerja sama internasional untuk menggerakkan India mempercepat dekarbonisasi. Indonesia sendiri melalui Presiden Joko Widodo dalam forum COP 26 menyebutkan Indonesia akan mencapai *carbon net sink* selambatnya tahun 2030, pemanfaatan energi terbarukan, mobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif, serta *carbon market and carbon price* menjadi bagian dari upaya perubahan iklim dalam negeri. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyarankan bahwa pemerintah perlu melakukan pendekatan *a whole government* dan *a whole society* perlu dilakukan berbarengan guna mencapai target *peak emission* nasional, *carbon net sink Forestry and Other Land Use (FOLU)* pada tahun 2030, dan *net-zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat (Debnath *et al.*, 2021; Khawarizmi, 2021; Kumar, 2021; Mcphearson, 2021).

Peran Pemerintah Lokal

Konstelasi politik praktis yang elite di tingkat daerah hingga nasional dinyatakan oleh GCI tidak menghambat dan mendukung, namun GCI merasakan bahwa situasi politik yang skalanya kecil mendukung dan memberikan fasilitas kepada GCI dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan GCI. Hal ini dirasakan oleh GCI ketika melaksanakan kegiatan Proyek Akhir Tahun yang dilaksanakan di daerah terpelosok dan rawan bencana. Dukungan yang didapatkan dari mulai izin hingga fasilitas pendukung.

"Tetapi kalau politis di sini dari mulai tingkat desa atau yang skupnya kami seperti ke RT kepala sekolah dan Desa, kami didukung dan difasilitasi. Waktu itu pernah juga kami di bukit gitu, mas dan malah dikasih penginapan di gedung sekolah oleh pemerintah desanya," kata FJR, 30 tahun.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa dukungan pemerintah atau lembaga lokal dari mulai Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) hingga Pemerintah Desa sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Kolaborasi yang kuat antara individu dan organisasi, seperti masyarakat, lembaga lokal, lembaga publik, organisasi nirlaba dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk mencapai sistem sosial-ekologi yang lebih berkelanjutan (Yuliasuti *et al.* 2017; Yanti & Yuliasuti 2019; Yulianti *et al.* 2021).

Pesan dalam Mencari Dukungan Dari Entitas Politik

Pesan menjadi salah satu senjata bagi GCI untuk mencari dan mendapatkan dukungan dari entitas politik. Penyampaian pesan yang dapat memengaruhi calon pendukung terdapat dalam pesan-pesan yang

disampaikan melalui proposal yang dibuat oleh GCI dan selalu disampaikan kepada calon pendukung yang telah ditargetkan oleh GCI. Pesan di dalam proposal tersebut berawal dari kondisi Indonesia yang menjadi latar belakang GCI dalam bergerak. Hal ini juga disampaikan untuk membangun kesadaran dan kepedulian akan masalah perubahan iklim yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut juga diangkat berdasarkan data yang sesuai dengan fakta.

Dalam mencari dukungan dari entitas politik khususnya pemerintah, GCI menyampaikan pesan mengenai permohonan narasumber. Pesan permohonan tersebut disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Forum Anak Nasional (FAN) yang merupakan organisasi binaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pesan ini disampaikan oleh GCI kepada entitas-entitas tersebut agar mendapatkan dukungan sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan GCI. Narasumber-narasumber tersebut diundang untuk kegiatan internal hingga konferensi yang diadakan oleh GCI. Pesan-pesan tersebut adalah sebagai berikut:

"Mengundang dalam berbagai kegiatan perubahan iklim di level nasional, memberikan kesempatan untuk tampil dalam berbagai kesempatan di level global," kata

IKR, 28 tahun, saat GCI menyampaikan pesan kepada KLHK.

"Mengundang dalam berbagai kegiatan atau event GCI dan berkoordinasi untuk aktivitas-aktivitas tertentu," kata IKR, 28 tahun, laki-laki saat GCI menyampaikan pesan kepada Forum Anak Nasional (FAN) yang merupakan organisasi binaan Kemen PPPA.

Pada kutipan di atas menunjukkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan dukungan berupa narasumber dalam kegiatan GCI dan kemudahan akses ke Kemen PPPA. Forum Anak Nasional yang merupakan binaan Kemen PPPA memberikan dukungan berupa narasumber, sumber daya manusia dan publikasi untuk menjaring anak-anak sebagai peserta dalam kegiatan yang bertujuan membangun Anak Cerdas Iklim.

Pesan mengenai rekam jejak dan program yang akan dijalankan oleh GCI juga disampaikan saat mengikuti lomba seperti kepada entitas politik khususnya pemerintah taraf regional yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Dispora Jabar). Pesan tersebut sebagai berikut.

"Pemaparan terkait dengan aktivitas GCI dalam bidang pendidikan lingkungan dan perubahan iklim kepada anak-anak di wilayah rawan bencana," kata IKR, 28 tahun saat GCI menyampaikan pesan dalam paparan Final Lomba Youth Innovation Summit yang diadakan Dispora Jabar.

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat memberikan dukungan berupa dana hibah senilai Rp 30 Juta Rupiah dan membuat GCI mendapatkan kepercayaan dari KLHK dan dari KLHK jadi bisa mengakses Kemen PPPA dan FAN.

Pemilihan pesan yang berbeda kepada berbagai entitas juga merupakan proses yang tepat. Dari hasil wawancara terlihat bahwa dilakukan proses observasi oleh GCI ketika mencari dukungan dan menyesuaikan pesan yang berbeda kepada calon-calon pendukung gerakan GCI. Langkah-langkah dalam menyusun pesan dan menyampaikan pesan dengann menyesuaikan dengan calon pendukung merupakan upaya yang bisa dipelajari oleh komunitas lainnya.

Media dan Cara Komunikasi dalam Mencari Dukungan Politik

Lomba merupakan cara dan media yang paling berdampak bagi GCI untuk mendapatkan dukungan. Komunitas yang didominasi oleh mahasiswa ini memiliki semangat juang untuk mendapatkan dukungan dari lomba akibat belajar dan terbiasa memiliki jiwa kompetitif saat belajar di kampus. Lomba Pemuda Pelopor Jawa Barat untuk Kategori Organisasi Lingkungan Hidup merupakan prestasi yang didapatkan oleh GCI. Tidak hanya mendapatkan prestasi berupa penghargaan hingga bantuan dana, cara mendapatkan

dukungan melalui jalur lomba juga menjadikan komunitas GCI mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan salah satu entitas yang menaruh kepercayaan kepada GCI setelah GCI meraih prestasi di Jawa Barat.

Pemanfaatan jaringan sosial dari entitas politik khususnya pemerintah juga dilakukan oleh GCI. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah menaruh kepercayaan sehingga selalu melibatkan GCI dalam berbagai kegiatan juga membantu GCI untuk membangun hubungan dengan Kemen PPPA yang memiliki tugas utama sebagai pemberdayaan perempuan dan anak, entitas ini sangat diperlukan oleh GCI untuk menyebarluaskan gerakan sosial GCI kepada anak-anak Langkah GCI dalam mencari dukungan dan melakukan mobilisasi sosial dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim merupakan upaya yang tepat karena Flor dan Cangara (2018) menyampaikan bahwa sedapat mungkin komunikasi lingkungan menerapkan praktik komunikasi yang bersifat dari bawah ke atas, maupun atas ke bawah agar mencapai pengertian. Lebih penting lagi, harus ditekankan pada proses enkulturasi dengan menggunakan komunikasi adat, media populer, penyadaran, dan mobilisasi sosial.

Gerakan Mandiri

Gerakan sosial yang dilakukan oleh GCI menggambarkan gerakan mandiri yang tidak dipengaruhi oleh politik. Tidak didukung oleh dukungan politik yang bersifat politik elite bahkan politik praktis atau latar belakang partai politik. Keinginan GCI untuk menyelesaikan masalah di bidang perubahan iklim murni hadir atas inisiatif sendiri dan tanpa adanya dorongan politik praktis. Sebaliknya, ide GCI dalam bergerak hadir ketika pemerintah dinilai belum memiliki kebijakan hingga program dalam mengatasi perubahan iklim. Pemerintah masih fokus dalam tindakan tanggap bencana dibanding preventif. Faturahman (2018); Patrianti *et al.* (2020) menyatakan bahwa gerakan-gerakan yang dibuat oleh pemerintah dari mulai Rencana Aksi Nasional (RAN) GRK, Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK, Pembangunan Industri Hijau, *Green Growth Economy*, hingga *Low Carbon Development Initiatives* dinilai belum menyentuh pemahaman dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat. Mitigasi bencana perlu masuk dalam kebijakan daerah dari mulai perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan dilakukan untuk menentukan arah kebijakan penanggulangan bersifat prabencana pada pembangunan daerah.

Kemandirian yang dipilih oleh GCI dengan tidak berpangku tangan kepada

pemerintah maupun golongan praktis lainnya menguntungkan bagi GCI untuk bergerak tanpa batasan-batasan politik, bahkan GCI memiliki komitmen untuk tetap bergerak meski harus merogoh sumber daya dari internal. Segala ide coba dilakukan untuk membuat gerakan ini terus hidup dan salah satunya dengan mengikuti berbagai lomba, baik yang diadakan oleh swasta maupun pemerintah. Dari beberapa lomba yang diikuti, GCI pernah mendapatkan penghargaan dan dukungan, salah satunya dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang menyakan GCI menjadi organisasi kepemudaan terbaik untuk kategori Organisasi Lingkungan Hidup. Tidak hanya mendapatkan dukungan berupa dana untuk menghidupi roda organisasi, penghargaan ini juga memberikan dampak positif bagi citra GCI yang semakin mendapat sorotan serta dukungan dari Lembaga, pemerintah daerah hingga Pusat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi salah satu instansi pemerintah yang menjadi semakin yakin akan peran GCI dalam aksi nyata menyelesaikan masalah perubahan iklim di tengah masyarakat. Berkat citra positif ini GCI kerap kali mendapatkan kepercayaan dari KLHK sebagai *stakeholder* yang selalu dilibatkan dalam diskusi pembuatan program hingga implementasi program untuk mengatasi perubahan iklim. Tangan

terbuka KLHK tidak hanya melibatkan GCI namun KLHK juga ikut serta dalam mendukung kegiatan-kegiatan GCI sebagai narasumber dan membantu GCI untuk dihubungkan kepada instansi maupun kementerian yang merupakan jejaring KLHK yang dapat mendukung dan membantu GCI. Salah satunya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang dihubungkan oleh KLHK dan mendukung gerakan GCI karena Kemen PPPA dan GCI memiliki target komunikasi yang sama yakni anak-anak Indonesia dan memiliki mimpi yang sama yakni mencerdaskan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Peran pemerintah dalam program perubahan iklim memang belum dirasakan oleh masyarakat ketika GCI sudah mulai bergerak dan merintis. Seiring berjalannya waktu, kini Pemerintah Indonesia sudah memiliki komitmen yang kuat dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia. Selain mendapat dorongan dari bawah (*bottom up*), komitmen Pemerintah Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang digelar di Glasgow, Skotlandia 2021 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo yang berpidato mewakili Indonesia menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencapai *carbon net sink* selambatnya tahun 2030,

pemanfaatan energi terbarukan, mobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif, serta *carbon market and carbon price* menjadi bagian dari upaya perubahan iklim dalam negeri. Tidak hanya Indonesia, hasil KTT tersebut juga memengaruhi banyak negara yang mulai memikirkan dan akan menjalankan solusi berbasis alam, namun Khawarizmi (2021) menilai bahwa Pemerintah yang merupakan lembaga eksekutif tidak bisa bergerak sendiri melainkan perlu melibatkan pilar-pilar lainnya seperti Lembaga Legislatif, Yudikatif, Media hingga masyarakat.

Dukungan entitas politik lainnya juga datang dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Institut Pertanian Bogor memang bukan lembaga politik praktis, namun sebagai lembaga pendidikan IPB memiliki kekuatan politik yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah daerah hingga pusat. Dalam hal ini, IPB memberikan dukungan berupa akses kepada *stakeholder* IPB yang dibutuhkan GCI seperti peneliti maupun akademisi yang dapat memberikan pengetahuan kepada Tim GCI sebelum terjun ke lapangan. Institut Pertanian Bogor juga memberikan dukungan berupa publikasi berbagi aktivitas GCI di media internal IPB hingga jejaring media yang dimiliki oleh IPB. Peran tersebut sangat mendukung GCI untuk membangun citra dan menyebarkan semangat

gerakan sosial untuk perubahan di bidang perubahan iklim.

Peran pemerintah atau pemangku kepentingan politik justru sangat besar dirasakan oleh GCI dari pemerintah tingkat lokal. Pemerintah lolak dari mulai Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) hingga Pemerintah Desa dinilai oleh GCI memberikan dukungan yang sangat besar. Kondisi ini dirasakan oleh GCI ketika akan melakukan kegiatan mengajar anak-anak dipelosok daerah mengenai perubahan iklim. Berbekal silaturahmi dan rencana kegiatan berupa proposal yang disampaikan pemerintah tingkat lokal tersebut memberikan dukungan berupa akses, izin hingga fasilitas yang dapat mendukung kegiatan seperti ruang menginap hingga ruang untuk kegiatan. Izin serta akses dari pemerintah lokal tersebut menjadi salah satu dukungan yang sangat berharga karena dengan demikian GCI dapat melakukan kegiatan di desa tersebut, bahkan dibantu untuk mengumpulkan anak-anak.

KESIMPULAN

Komunikasi gerakan sosial yang dilakukan oleh Komunitas Generasi Cerdas Iklim (GCI) merupakan praktik yang dilatarbelakangi oleh keresahan akan masalah yang terjadi. Hal ini dapat terjadi karena pendiri GCI didominasi oleh mahasiswa jurusan Geofisika Meteorologi Institut Pertanian Bogor yang mempelajari

ilmu perubahan iklim serta paham akan masalah yang terjadi serta ancaman yang dapat terjadi kepada kelompok-kelompok rentan.

Keresahan dan keilmuan tersebut menjadikan pendiri GCI tidak hanya mengeluh dan meminta pemerintah menyelesaikan masalah tersebut namun menciptakan *ideation* untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menyelamatkan generasi penerus bangsa dan melakukan praktik komunikasi gerakan sosial. Ide yang menjadi cikal bakal terjadinya praktik komunikasi tersebut direalisasikan dengan membuat komunitas dan melakukan kegiatan komunikasi kepada anak-anak di wilayah rentan bencana akibat perubahan iklim sebagai bentuk pencerdasan dan upaya perubahan perilaku. Komunitas Generasi Cerdas Iklim merupakan aktor komunikasi yang juga bisa dikatakan sebagai *agent of change* apalagi pada saat GCI memulai gerakan pemerintah masih belum memiliki kegiatan aktivitas komunikasi berupa langkah preventif untuk mengatasi masalah perubahan iklim.

Ide yang didasari oleh keresahan tersebut menjadi fondasi bagi GCI dalam bergerak sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi politik praktis, bahkan GCI merasa bahwa politik praktis yang identik dengan dunia partai dan pemerintah daerah hingga pusat tidak menghambat dan juga tidak

membantu karena GCI ingin menjadi komunitas yang mandiri. Meskipun demikian, GCI dapat memanfaatkan kekuatan politik melalui media dan cara lomba yang diikutinya di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berhasil mendapat juara. Tidak hanya itu, GCI juga mendapatkan dukungan pendanaan dan kepercayaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadi aktor komunikasi (*focal point*) dalam isu perubahan iklim. Komunitas GCI juga mendapatkan dukungan dari entitas yang memiliki kekuatan politik yakni IPB yang memberikan bantuan dana, akses dan publisitas. Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan dukungan kepada GCI karena hampir semua pengurus GCI merupakan mahasiswa IPB dan GCI juga merupakan komunitas yang berprestasi.

Dalam menjalankan praktik komunikasi gerakan sosial, GCI menyampaikan pesan mengenai permohonan narasumber dan penyampaian program kerja kepada entitas politik khususnya pemerintah ternyata membuahkan hasil. Efeknya, tidak hanya mendapatkan dukungan narasumber dari pemerintah, GCI juga mendapatkan dukungan akses ke instansi lain dan dukungan dana melalui proses lomba. Pemilihan pesan dalam praktik komunikasi gerakan sosial yang berbeda-beda kepada berbagai entitas merupakan strategi

komunikasi yang tepat. Teridentifikasi bahwa proses analisis situasi dan memahami stakeholder sebagai komunikasi ketika mencari dukungan dan menyesuaikan pesan yang berbeda kepada calon-calon pendukung gerakan GCI merupakan langkah yang tepat dan bisa diimplementasikan di komunikasi gerakan sosial lainnya dalam menghadapi peran politik maupun bidang lainnya. Langkah-langkah dalam menyusun pesan dan menyampaikan pesan dengan menyesuaikan dengan calon pendukung merupakan upaya yang bisa dipelajari oleh komunitas lainnya

Kontelasi politik praktis di tingkat daerah hingga pusat memang tidak memberikan pengaruh, hambatan dan dukungan kepada GCI, namun GCI merasakan bahwa justru pemerintah tingkat lokal seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) hingga Pemerintah Desa sangat memberikan manfaat bagi GCI. Manfaat tersebut seperti perizinan kegiatan hingga fasilitas pendukung ketika GCI tengah berkegiatan bersama adik-adik dan juga masyarakat di suatu daerah terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, T. T. (2020). Kepemimpinan muda berbasis komunitas di Indonesia. In *Des Butuh Lo, Sob* (1st ed., Vol. 1, pp. 141–171). Kepustakaan Populer Gramedia.

- Danty, & Zul. (2019). *Generasi cerdas Iklim IPB University Raih Penghargaan Organisasi Kepemudaan dari Ridwan Kamil*.
<https://greencampus.ipb.ac.id/generasi-cerdas-iklim-ipb-university-raih-penghargaan-organisasi-kepemudaan-dari-ridwan-kamil/>
- Debnath, R., Sagar, A., Babu, S., & Shuckburgh, E. (2021). COP26 futures we want – India country profile. *Cambridge Open Engage*, 2(10), 1389–1396. <https://doi.org/10.33774/coe-2021-ns37b>
- Dewantara, R. W., & Widhyharto, D. S. (2016). Aktivisme dan kesukarelawanan dalam media sosial komunitas kaum muda Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(1), 40. <https://doi.org/10.22146/jsp.10855>
- Faisal, M. (2017). *Generasi Phi: Memahami Milenial Pengubah Indonesia* (S. Maradona & U. Rusydan (eds.); Edisi ke-1). Republika Penerbit.
- Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2365>
- Flor, A. G., & Cangara, H. (2018). *Komunikasi Lingkungan* (Edisi Ke-1). Prenadamedia Group.
- Hapsari, D. R. (2016). Peran jaringan komunikasi dalam gerakan sosial untuk pelestarian lingkungan hidup. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i1.33>
- Hasna, S. (2022). Tindakan kolektif masyarakat jaringan di Indonesia: Aktivisme sosial media pada aksi #Gejayanmemanggil. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 25–34. <https://doi.org/10.14710/interaksi.11.1.25-34>
- Hidayat, A. (2017). Konstruksi gerakan sosial: Efektivitas gerakan lingkungan hidup global. *Jurnal Administrative Reform*, 5(2), 56. <https://doi.org/10.52239/jar.v5i2.662>
- Khawarizmi, V. A. El. (2021). Momentum Cop 26: Pemutakhiran climate action di Indonesia. *Isu Sepekan*, 3(11), 3.
- Kumar, A. (2021). COP26: Global initiatives on climate change and global warming: Mitigation. *Jour Pl Sci Res*, 37(2), 417–425.
- Lasinta, M., Pandjaitan, N. K., & Sarwoprasodjo, S. (2019). Struktur jaringan komunikasi dalam membangun perilaku ramah lingkungan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(8), 199–125.
- Manulu, D. (2016). Gerakan sosial dan perubahan kebijakan publik kasus perlawanan masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara. *Populasi*, 18(1), 27–50. <https://doi.org/10.22146/jp.12066>
- McAdam, D. (2017). Social movement theory and the prospects for climate change activism in the United States. *Annual Review of Political Science*, 20, 189–208. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-052615-025801>
- Mcphearson, T. (2021). COP-26: Make nature-based solutions a top adaptation priority. *The New School*, 1(10).
- Morissan. (2015). *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa* (Edisi Ke-3). Kencana Prenada Media Group.
- Nofrima, S., & Qodir, Z. (2021). Gerakan sosial baru Indonesia: Studi gerakan gejayan memanggil 2019. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 185. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i1.2163>
- Nugroho, A. (2015). Geliat organisasi pemuda lingkungan (OPL) dalam ranah gerakan lingkungan di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 9(1), 129–148. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091->

- 07
- Olson, C. C. (2016). #BringBackOurGirls: Digital communities supporting real-world change and influencing mainstream media agendas. *Feminist Media Studies*, 16(5), 772–787. <https://doi.org/10.1080/14680777.2016.1154887>
- Patrianti, T., Shabana, A., & Tuti, R. W. (2020). Government risk communication on greenhouse gas emission reduction to tackle climate change. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(2), 156–170. <https://doi.org/10.33299/jpkop.24.2.3416>
- Ramdani, J., & Resnawati, R. (2022). Kolaborasi multi pihak pada program kampung iklim di Kabupaten Cilacap. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(3), 191–198. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35152>
- Sinaga, L. C. (2020). Assessing the commitment of Indonesian government towards climate change policy: The Yudhoyono Presidency 2004-2014. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(2), 163–182. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i2.1752>
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi ke-4). PT Rajagrafindo Persada.
- Suharko, Alam, M., Madya, S. H., Prastowo, F. R., & Nugroho, A. (2002). *Organisasi pemuda lingkungan di Indonesia pasca orde baru* (Edisi ke-1). Gajah Mada University Press.
- Susanti, S., & Nurtania, Y. (2017). Model perilaku komunikasi Komunitas Hong dalam melestarikan permainan dan mainan tradisional sunda. *Komuniti*, 9(2), 126–145.
- Sutrisno, S. (2011). Politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 444–464. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art8>
- Tambunan, R. M. (2021). Model Komunikasi Dukungan Sosial terhadap Kecerdasan Emosional, Resiliensi Pengasuhan Anggota Keluarga dan Orang Tua Anak Remaja Cerebral Palsy. In P. Muljono (Ed.), *Dinamika Komunikasi Pembangunan di Tanah Air* (1st ed., Vol. 1, pp. 256–304). IPB Press.
- Yanti, N. R., & Yuliasuti, N. (2019). Penilaian kualitas kampung hijau Rawajati sebagai kampung ramah lingkungan yang berkelanjutan. *Jurnal Teknik PWK*, 8(3), 120–133.
- Yulianti, T., Darmawan, A., Sutansah, O., & Shurur, A. L. (2021). Membangun kesadaran masyarakat menuju Kampung Hijau di Manukan Kulon RW. III Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 1(3), 10–23.
- Yuliasuti, N., Wahyono, H., Syafrudin, S., & Sariffuddin, S. (2017). Dimensions of community and local institutions' support: Towards an eco-Village Kelurahan in Indonesia. *Sustainability*, 9(2), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su9020245>
- Zhang, J. Y. (2018). Cosmopolitan risk community in a bowl: A case study of China's good food movement. *Journal of Risk Research*, 21(1), 68–82. <https://doi.org/10.1080/13669877.2017.1351473>
- Zhang, W., & Mao, C. (2013). Fan activism sustained and challenged: Participatory culture in Chinese online translation communities. *Chinese Journal of Communication*, 6(1), 45–61. <https://doi.org/10.1080/17544750.2013.753499>
- Zul. (2017). *Generasi Cerdas Iklim Bogor Raih Penghargaan Internasional*. <https://www.brin.go.id/generasi-cerdas-iklim-bogor-raih-penghargaan-internasional/>